

**SUDUT PANDANG PENGONTRUKSIAN PRO DAN KONTRA DALAM
KONSEP SYIRIK DI POLITIK ISLAM**

Submitted : November 2023

Revised : November 2023

Published : November 2023

Joko Setiyawan¹, Rifki Suganda²

Universitas Islam Negeri Salatiga^{1,2}

joko.setiyawan2019@gmail.com¹, rifkisuganda2000@gmail.com²

Abstract: This article examines Islamic politics from the Al-Qur'an, Surah Al Imran verse 159 concerning deliberation. This paper argues that deliberation and consensus is one of the values and principles of Islamic politics in the Al-Qur'an. These interpretations even suggest that the Prophet Muhammad SAW, as the leader of the Muslim community at that time, often took decisions suggested by his friends, not based on his own opinion. Several religious figures also stated that politics without a state would not be successful and a state without politics would be impossible, because politics and religion are an inseparable unity, politics itself is simply the application of the absolute mind in humans regarding instruments. It is important in achieving a goal that every human desires, and religion itself has a role in decision making and guiding humans in taking and carrying out tasks in a maslahah way. Therefore, this paper shows that one of the principles of Islamic politics from the Koran is achieving consensus in making decisions that involve many parties and by involving them in decision making.

Keywords: *Islamic Politics, State and Religion, Shirk, Political Principles, Politization*

Abstrak: Artikel ini mengkaji politik Islam dari Al-Qur'an surat Al Imran ayat 159 tentang musyawarah. Tulisan ini berargumen bahwa musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an. Tafsir-tafsir tersebut bahkan mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam saat itu sering mengambil keputusan yang disarankan oleh para sahabatnya, bukan berdasarkan pendapatnya sendiri. Beberapa tokoh agama juga menyatakan bahwa politik tanpa negara tidak akan berhasil dan negara tanpa politik tidak mungkin terjadi, karena politik dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, politik sendiri hanyalah penerapan pikiran mutlak pada manusia mengenai instrumen. Hal ini penting dalam mencapai suatu tujuan yang di idam-idamkan setiap manusia, dan agama sendiri mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan dan membimbing manusia dalam mengambil dan melaksanakan tugas secara maslahah. Oleh karena itu, tulisan ini menunjukkan bahwa salah satu prinsip politik Islam dari Al-Quran adalah mencapai mufakat

dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak dan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Politik Islam, Negara dan Agama, Syirik, Prinsip Politik, Politisasi*

A. Pendahuluan

Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok. Tulisan ini menggambarkan bahwa politik Islam dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam, yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah.¹

Tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam yang dipentingkan dalam Al-Quran. Tafsir-tafsir ini malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama, bukan keputusan yang bersumber dari dirinya sendiri. Beberapa tokoh agama juga menyebutkan bahwa politik tanpa negara tidak berjalan dan negara tanpa politik tidaklah mungkin.²

Dengan demikian, tulisan ini menunjukkan bahwa salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an adalah anjuran untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak orang dan dengan melibatkan banyak orang. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, bukan suara pemimpin politik saja, dimana dalam sebuah pengambilan keputusan berdasarkan rasa kebersamaan yang didalamnya tidak ada rasa paksaan atau tekanan dalam menyetujuinya, sehingga keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip politik Islam di dalam Al-Qur'an.³

¹ Delmus Puneri Salim, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasa Surat Ali Imran Ayat 159)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (31 Januari 2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.499>.

² Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (24 November 2017): 1–21, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

³ Syarifah Ainul Mardiah, "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Qur'an (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)" (Skripsi, Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/706>.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengacu kepada pemikiran tokoh. Objek pemikiran tokoh yang digunakan terbagi menjadi dua yakni formil dan materil, pemikiran tokoh dan formil yakni mengacu kepada gagasan para tokoh. Dalam pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan bersifat *historis*

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sudut Pandang Pro Dalam Konsep Syirik Di Politik Islam

Perlu diketahui bahwa pemahaman politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Konsep politik yang dikenal dalam Islam yakni ;

- a. kepemimpinan oleh penerus Nabi yang disebut sebagai Kalifah (Imam dalam Syiah),
- b. pentingnya mengikuti hukum Syariah,
- c. kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara,
- d. kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.

Islam adalah agama yang bersifat universal dimana meliputi semua unsur kehidupan, dan politik, Negara dan tanah air adalah bagian dari islam. tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna.⁴ Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Tarbiyah Politik Hasan Al Banna: Referensi Gerakan Dakwah Di Kancan Politik* (Jakarta: Arah Press, 2007), //0.0.0.0/index.php?p=show_detail&id=32289&keywords=.

kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).

Di sebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ ظَعًا عَلِيًّا لَلْأَلْبَابُ لَنَفَضْنَا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيمَا أَمْرًا إِذْ أَعْرَضْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Arab latin: *Fabimaa rahmatim minallaahi linta lahum, wa lau kunta fajzan galiizal-qalbi lanfadduu min haulik(a), fa'fu 'anhum wastagfir lahum wa syaawirhum fil-amr(i), fa izaa 'azamta fa tawakkal 'alallaah(i), innallaaha yuhibbul-mutawakkiliin(a).*

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."⁵

Jelas disebutkan didalam quran surat ali Imran ayat 159 tersebut dimana memerintahkan kita dalam menyelesaikan sebuah perkara atau kasus hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah yang dimana tindakan tersebut merupakan bentuk dari berpolitik. Secara lengkapnya Imam Al-Ghazali mengatakan: "Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia".⁶ Dari pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu hukumnya wajib dikarenakan berpolitik merupakan prasyarat dari beragama yang sifatnya baik dan nyaman. Begitulah islam memandang politik yang sangatlah berperan.

Karena praktiknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, bohong, dan korup, timbullah kesan umum bahwa politik (pada situasi tertentu)

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

adalah kotor dan harus dihindari. Mujaddid Islam, Muhammad Abduh pun pernah marah kepada politik dan politisi karena berdasarkan pengalaman dan pengamatannya waktu itu beliau melihat di dalam politik itu banyak yang melanggar akhlak, banyak korupsi, kebohongan, dan kecurangan-kecurangan yang menimbulkan sebuah pemikiran bahwa berpolitik dalam islam itu sangatlah tidak benar. Dengan demikian nampaklah bahwa sebenarnya apa yang dilakukan menjelaskan bahwa dengan cara berpolitiklah dapat menjawab segala persoalan yang dirasanya itu.

Muhammad Abduh pernah mengungkapkan doa taawwudz dalam kegiatan politik ,”Aku berlindung kepada Allah dari masalah politik, dari orang yang menekuni politik dan terlibat urusan politik serta dari orang yang mengatur politik dan dari orang yang diatur politik”. Tetapi dengan mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syari’at karena tugas-tugas syari’at hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa (organisasi negara).

Dalam kaitan inilah ada kaidah ushul fiqh yang menyebutkan “Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan/ dipenuhi). Dengan kata lain, “jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya.” Inilah yang menjadi dasar, mengapa sejak awal turunnya Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan Negara, dan Rasulullah, SAW, Khulafaur Rasyidin serta para pemimpin islam terdahulu telah membuktikannya.

Mengutip pandangan Muhammad Rasyid Ridha Quraish Shihab menjelaskan bahwa sering kali umat Islam membuat syarat-syarat tertentu yang kemudian membelengu mereka sendiri. Dalam hal musyawarah, beliau menutup penjelasan surat Ali Imran ayat 159 dengan menyebutkan kutipan yang sama berasal dari Muhammad Rasyid Ridha bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan dalam urusan dunia dan kepentingan

masyarakat dengan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah.⁷ Utsman bin Affan Ra pernah berkata, Kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Alquran akan Allah Swt lenyapkan melalui tangan penguasa. Itulah aura pemimpin yang diharapkan. Maka dalam hal ini ketika di kaitkan dengan hubungan agama dan politik memuat berbagai kepentingan sosial dan tidak bisa dipisahkan dengan mudah dalam hal-hal yang menjadikan suatu acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitanya politik dan agama sendiri yakni Agama memiliki tujuan yang sangat strategis dalam penanaman nilai dan norma-norma dalam pengkontruksian bernegara. Sedangkan negara menggunakan dokmatik untuk mengikat arga negara untuk mematuhi negara. Maka dalam hal ini Agama dan Politik saling tarik menarik dan saling berkaitan dan saling melengkapi. Karena pada dasarnya dalam agama kaitanya dengan politik sendiri memang memberikan pencerahan mengenai tata prilaku dan norma dalam masyarakat. Maka Agama sendiri juga sebagai reorganisasi masyarakat dengan berlandaskan norma-norma, dan nilai-nilai agama dalam pembagunan masyarakat.⁸

2. Sudut Pandang Kontra Dalam Syirik Di Politik Islam

Sistem politik dalam agama islam pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang, melainkan sesuatu yang dianjurkan untuk ditata pelaksanaannya dalam kehidupan agar politik yang ada berjalan sesuai apa yang telah Allah tetapkan dengan kata lain sesuai dengan landasan syari' ah dan tidak melenceng dari jalan yang la tidak ridhoi. Dengan adanya sistem politik tugas khalifah atau pemimpin dapat dijalankan lebih realistis dan efektif. Politik merupakan media atau wasilah yang cukup efektif untuk menegakkan syariat islam dengan aturan dan hukum-hukumnya dimuka bumi ini. Rasulullah merupakan bukti gemilang seorang pemimpin yang menerapkan sistem politik dengan aturan dan kehendak Allah dalam kitabnya al-qur'an. Sebagai contoh konkret keberhasilan politiknya adalah ketika beliau berhasil menegakkan syari'at islam dengan membangun sebuah negara khilafah islam al-Madinah al-Munawwarah.

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁸ Fidiansjah Fidiansjah, "Peran Kecerdasan Spiritual Bagi Peningkatan Kinerja Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 3 (2018): 2–10.

Ada tiga sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu (kebodohan), dhai ful iiman(lemahnya iman), dan tagliid (ikut-ikutan secara membabi-buta). Al-jahlu sebab pertama perbuatan syirik. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sebab, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Penyebab kedua perbuatan syirik adalah dhai'ful iimaan (lemahnya iman). Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Taqlid sebab yang ketiga. A-Qur'an selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah berfirman, "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji. ' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (QS. Al-A'raf: 28). Umat muslim, dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur'an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat di dalam pedoman tersebut.

3. Dasar Politik Dalam Islam Dan Pengertian Politik Dalam Islam

Sistem politik dalam pandangan islam adalah hukum atau pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan masyarakat diurus dan diatur dengan hukum Islam. Sebab, politik itu sendiri dalam pandangan islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pandangan beberapa orang mengenai politik dalam islam, salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Saudara Abshar-Abdalla dalam kajian di Jawa Pos, 1 Juni 2003 diantaranya;

- a. Sistem poltik dalam islam adalah sistem khalifah (pemimpin) yaitu sistem politik yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur rasyidin yang dijadikan scbagai teladan bagi umat islam.
- b. Sistem poltik dalam islam sejatinya tidak ada. Karena Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang misinya mensyiarkan agama islam bukan sebagai pemimpin dan pengatur aganma.

- c. Sistem politik atau sistem ketatanegaraan dalam islam tidak ada, tapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara Lepas dari pendapat-pendapat diatas, dalam kenyataannya, pada masa Nabi Muhammad SAW, dimana dalam masa itu beliau tidak hanya sebagai rasul tetapi juga sebagai pemimpin Negara, sebagai buktinya yaitu aturan dasar Negara yang berupa Piagam Madinah, yang oleh Hamidullah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah pada awal dekade ketiga abad VIIM (622) atau tahun 1 H. Dan kepemimpinan ini terus berlanjut sampai dibawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara tegas mengenai wujud dari suatu sistem politik dalam islam, hanya dalam beberapa ayat disebutkan bahwa islam terkait dalam dua faktor yaitu kekuasaan politik hanya akan dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. Tidak hanya itu, sistem politik dalam islam juga berkaitan dengan ruang dan waktu, dengan kata lain dihubungkan dengan peristiwa bersejarah, yang salah satu bentuknya yaitu Piagam Madinah tersebut.⁹

Syirik politik jenis di atas terjadi pada orientasi. Di sinilah letak relevansi dari hadits riwayat Umar ibn Al-Khattab, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap urusan bergantung pada apa yang telah ia niatkan (Arba' in An-Nawawiyah., hadits ke-1). Ketika niat tidak lagi bergantung pada Allah, muncul maksiat. Syirik Politik ini akan membuat perilaku-perilaku tidak lagi mempertimbangkan maslahat-mudharat atau syar'i-tidaknya lagi.

Kedua, munculnya kezaliman politik". Bentuk syirik politik kedua adalah adanya penindasan dari *the ruling class* (kelas yang berkuasa) kepada *subordinated class* (oposisi). Potret penindasan ini muncul dalam bentuk kooptasi dari partai yang memiliki kekuatan massa besar kepada kelompok oposisi. Atau, penindasan kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan berkedok konglomerasi dan *oligarkhi*. Praktik *otoritarianisme*, di mana kebebasan dibungkam dan aktivis-aktivis Islam yang menyuarakan aspirasinya ditangkap, justru berlawanan dengan konsep tauhid

⁹ Hesti Pancawati, "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara," *Aqlania* 9, no. 1 (23 Juni 2018): 73–110, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>.

sosial, di mana setiap manusia yang merupakan ciptaan Allah yang memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Ketiga yakni sudut pandang mengenai syirik dalam politik islam lebih mengerucutnya kita mengacu kepada kelompok *khawarij*, dalam kelompok ini berpandangan bahwa aliran ini lebih tepat disebut aliran politik, yang mana dalam hal ini aliran ini di kelompokkan kepada aliran *teologi*. Yang mana dalam hal ini didasarkan dengan wahyu, dan kemudian membicarakan mengenai permasalahan tentang dosa, iman dan kafir. Maka aliran ini dikategorikan ke aliran *teologi*. Mereka berpandangan bahwa mereka yang melakukan selain dengan hukum allah adalah kafir. Menurut *khawarij* sendiri berpandangan bahwa pelaku besar seperti zina, meninggalkan perintah allah dan melaksanakan keputusan selain ketentuan allah adalah kafir. Muatan substansi kafir kemudian mengalami perkembangan sesuai dengan semangat dari sekte-sektenya.¹⁰

D. Kesimpulan

Dalam Berpolitik di islam dikenalkan bahwa Berpolitik merupakan sebuah metode yang digunakan dalam suatu cara untuk menjalankan pemerintahan yang diajarkan oleh baginda agung Rosulullah SAW yang dimana dijelaskan pula di dalam quran surat Ali Imran ayat 159 yang jelas menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hendaknya melakukan musyawarah. Didalam suatu riwayat juga menyebutkan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).

Dapat dilihat betapa utamanya berpolitik yang diajarkan dan harus dikuasai oleh seseorang di mata islam. Namun tidak banyak juga yang berpendapat bahwasanya berpolitik merupakan suatu tindakan yang dilarang dikarenakan merasa bahwa berpolitik merupakan suatu tindakan yang buruk karena banyaknya

¹⁰ Khotimah Suryani, "Bahasa Perdagangan Dan Kebangsaan Dalam Pemikiran Khawarij," *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 1 (28 April 2022): 141–61, <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3162>.

tindakan yang buruk atas politik sendiri. Sehingga muncul angan dan teori yaitu tiga sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu (kebodohan), dhaif iiman (lemahnya iman), dan tagliid (ikut-ikutan secara membabi-butu). Ketiga hal ini mendasarkan pemikiran yang dimana jika seseorang tidak cakap berdampak bagi sekitar.

Dalam kehidupan bermasyarakat dimana adanya interaksi sosial yang didalamnya tentu menimbulkan sebuah polemic dimana jika dalam satu lingkup tidak adanya struktur yang mengatur didalamnya pastilah timbul persoalan akan siapa yang bertanggung jawab atasnya, hal ini lah yang membuat harus adanya sebuah politik di dalamnya untuk mengatur sebuah interaksi tersebut, berpolitik dalam lingkup kecil memanglah sesuatu yang dirasa gampang dalam penanganannya, namun berbeda jika dalam lingkup luas seperti halnya bernegara. Hal inilah yang mewajibkan seseorang harus lihai dan pandai didalamnya, dalam islam hal ini sangatlah diperlukan karena seseorang yang tidak cakap dalam mengemban suatu amanat akan berimbas bukan hanya untuk satu dua orang melainkan semua elemen yang ada didalamnya. Hal inilah yang membuat adanya anggapan bahwa politik dalam islam itu perlu dan tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidiansjah, Fidiansjah. "Peran Kecerdasan Spiritual Bagi Peningkatan Kinerja Legislatif Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 3 (2018): 2–10.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (24 November 2017): 1–21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Mardiah, Syarifah Ainul. "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Qur`an (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)." Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/706>.
- Pancawati, Hesti. "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara." *Aqlania* 9, no. 1 (23 Juni 2018): 73–110. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>.
- Salim, Delmus Puneri. "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasa Surat Ali Imran Ayat 159)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (31 Januari 2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.499>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- Suryani, Khotimah. “Bahasa Perdagangan Dan Kebangsaan Dalam Pemikiran Khawarij.” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 1 (28 April 2022): 141–61. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3162>.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Tarbiyah Politik Hasan Al Banna: Referensi Gerakan Dakwah Di Kancah Politik*. Jakarta: Arah Press, 2007. http://0.0.0.0/index.php?p=show_detail&id=32289&keywords=.